

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

BPKB ialah pihak pengawas internal pemerintah pusat yang memiliki tanggungjawab secara langsung kepada pihak Presiden yang melaksanakan pengawasan internal berkenaan dengan akuntabilitas keuangan Negara yang mencakup aktivitas kebendaharaan umum Negara dan juga lintas sektoral (BPKP, 2019). Berdasarkan dengan Pasal 59 berkenaan dengan keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001 menjelaskan bahwa definisi BPKP ialah instansi Pembina Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan jabatan fungsional dari auditor yang mencakup; peningkatan kompetensi auditor, pembimbingan dan konsultasi, sosialisasi, dan penyusunan pedoman teknis (KEPPRES, 2001: 103) dengan demikian usaha untuk menaikkan kinerja terhadap beberapa profesi menjadi pembahasan terhadap organisasi profesi dalam menjamin kepercayaan dan keberadaan masyarakat (Prabhawa, 2014). Maraknya kasus penyimpangan dan ketidak transparanan keuangan yang terjadi di Bali mengakibatkan peran dari BPKP ini menjadi sangat diragukan mengapa lembaga pengawasan semacam ini masih belum dapat menjalankan fungsi-fungsinya secara baik sehingga penyimpangan-penyimpangan semacam itu masih bisa terjadi meskipun pemeriksaan, pengawasan pembinaan

dan pengelolaan keuangan daerah merupakan tugas utama dari BPKP (Prabhawa, 2014).

Sebagai contoh kasus penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada Perwakilan BPKP Provinsi Bali ialah berkenaan dengan hasil dari pengauditan yang masih dipertanyakan dan diragukan hasilnya oleh para pemegang saham (*stakeholders*) (Murtapa & Budiarta, 2017). Hasil dari pengauditan perhitungan kerugian keuangan Negara terhadap kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) Denpasar pada tahun 2012 ini dipersoalkan oleh pihak tersangka dan Penasehat Hukum pada saat terjadinya persidangan, hal ini disebabkan karena hasil dari pengauditan yang dilaksanakan oleh BPKP memiliki hasil yang berbeda dengan hasil pengauditan yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, terlebih dari pihak BPKP yang dihadirkan di dalam persidangan oleh Jaksan Penuntut Umum (JPU) dianggap masih bersifat memihak di dalam menyampaikan keterangan, dengan demikian kualitas dari hasil pengauditan dan kompetensi dari auditor tersebut kualitasnya masih diragukan (Murtapa & Budiarta, 2017). Pada tahun 2018, Gubernur Provinsi Bali yaitu Made Mangku Pastika meminta BPKP untuk memastikan fungsi dari pengawasan yang dilaksanakan, dengan demikian bisa menaikkan keefektivitasan dari pelaksanaan pembangunan, sementara itu fungsi pengawasan mempunyai peranan yang penting dalam mengupayakan terwujudnya *good governance*. Menurut pendapat dari Mangku Pastika, sebagai salah satu dari beberapa upaya untuk memastikan pengawasan ialah dengan cara meningkatkan sinergi dengan pihak aparat pengawasan internal pemerintah lainnya

secara optimal, dan juga sebagai dukungan terhadap proses pengambilan kebijakan (Rhismawati, 2017).

Auditor internal pemerintah sebagai auditor dari BPK memiliki peran harus mampu menaikkan kinerja dari auditor internal pemerintah dengan baik demi kebaikan saat ini ataupun kebaikan di masa mendatang (Prabhawa, 2014). Kinerja dari auditor tersebut sebagai indikator terhadap tingkat dari auditor dalam meraih hasil, khususnya ditinjau dari segi kuantitas dan juga kualitas. Tingkat kapasitas yang baik dari auditor ini memberikan sumbangan pengaruh terhadap kinerja dari audit yang menunjukkan bahwa auditor yang mempunyai kapasitas yang baik akan menghasilkan output yang efektif dan juga sebagai refleksi dari kinerja dari auditor dan demikian juga sebaliknya (Nugraha & Ramantha, 2015).

Sifat independensi ialah suatu sikap yang tidak memihak dan jugadapat terpengaruh terhadap kepentingan dari pihak manapun dalam melaksanakan pengauditan, dengan demikian auditor tidak diperbolehkan untuk memihak dan juga terpengaruh terhadap kepentingan yang berasal dari pihak tertentu. Dalam menjalankan pemeriksaan, auditor memperoleh kepercayaan dari pihak pengguna laporan keuangan dan juga klien dalam menunjukkan kelayakan dari laporan keuangan yang dirancang dan disajikan oleh pihak pengguna laporan keuangan dan juga klien (Jesika, Simjnutak & Sihombing, 2015). Auditor harus memiliki sifat independen dalam memberikan pendapat keuangan yang diperiksa, baik itu oleh pihak pengguna audit atau klien dan juga pihak auditor itu sendiri. Independensi dari pihak auditor bisa saja terpengaruh apabila pihak auditor tersebut memiliki suatu kepentingan keuangan atau memiliki keterkaitan usaha dengan pihak pengguna audit

atau klien yang dilakukan pengauditan tersebut (Rapina, Saragi & Carolina, 2010). Asistensi dari pengimplementasian dari *good governance* tercantum di dalam daftar dari salah satu aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak BPKP (BPKP, 2019). Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) juga memberikan sumbangan pengaruh terhadap kinerja dari auditor. Dengan tata kelola yang baik, maka seorang pemimpin memiliki kapasitas yang baik dalam mempengaruhi bawahan atau orang lain, dengan demikian bawahan atau orang lain tersebut bersedia melaksanakan kemauan dari seorang pemimpin dalam usahanya untuk meraih tujuan dari seorang pemimpin tersebut, meskipun hal tersebut secara pribadi tidak disenangi oleh bawahan atau orang lain tersebut (Hanna & Firnanti, 2013). *Good governance* ialah suatu keadaan tata kelola yang baik terhadap suatu upaya dan usaha yang didasarkan terhadap etika profesionalisme dalam berkarya (Azlina & Amelia, 2014). Menurut penjelasan dari Widyananda (2008) menjelaskan bahwa terminologi dari *good governance* merupakan sebuah keterampilan atau kapasitas manajemen dalam mengelola sumberdaya dan juga urusan dari sebuah Negara dengan cara yang responsif, kewajaran, dapat dipertanggungjawabkan, transparansi dan terbuka terhadap keperluan dan kepentingan masyarakat dari Negara tersebut. Berdasarkan pada definisi yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa konsep dari definisi *good governance*, di dalamnya terdapat unsure kemitraan, partisipatif, transparansi, adil dan juga demokratis.

Salah satu dari beberapa persyaratan yang harus dimiliki oleh seorang auditor dalam melaksanakan tugas pengauditan ialah kemampuan untuk mempertahankan sikap profesionalisme. Profesionalisme ini merujuk pada perilaku,

kualitas dan tujuan yang memberikan ciri khas yang terdapat pada suatu profesi tertentu atau orang yang terlibat dalam profesionalisme tersebut (Nugraha & Ramantha, 2015).

Adapun kajian empirik yang mendukung penelitian ini ialah hasil dari penelitian yang dilaksanakan oleh Kirana dan Suprasto (2019) dengan hasil penelitian yang memperlihatkan bahwa independensi dari auditor dan pemahaman berkenaan dengan *good governance* memiliki sumbangan pengaruh yang positif terhadap kinerja auditor, dan juga hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Prabayanthi dan Widhiyani (2018) dengan hasil yang menunjukkan variabel profesionalisme, berpengaruh positif terhadap kinerja dari auditor. Berdasarkan dengan hasil dari uraian latar belakang yang sudah dipaparkan tersebut di atas, maka peneliti mengajukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pemahaman Good Governance, Profesionalisme, dan Independensi Pada Kinerja Auditor Perwakilan BPKP Provinsi Bali”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada hasil uraian latar belakang penelitian tersebut di atas maka identifikasi masalah yang diuraikan dalam penelitian ini adalah sebagai mana berikut ini.

1. Made Mangku Pastika meminta BPKP untuk memastikan fungsi dari pengawasan yang dilaksanakan, dengan demikian bisa menaikkan keefektivitasan dari pelaksanaan pembangunan, sementara itu fungsi pengawasan mempunyai peranan yang penting dalam mengupayakan terwujudnya *good governance*. Menurut pendapat Mangku Pastika dalam sambutan

pelantikan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali Ari Dwikora

Tono (Rhismawati, 2017) menjelaskan bahwa perencanaan yang baik musti diikuti oleh system pengawasan yang baik juga.

2. Hasil dari pengauditan perhitungan kerugian keuangan Negara terhadap kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Institut Hindu Darma Negeri (IHDN) Denpasar pada tahun 2012 ini dipersalahkan oleh pihak tersangka dan Penasehat Hukum pada saat terjadinya persidangan, hal ini disebabkan karena hasil dari pengauditan yang dilaksanakan oleh BPKP memiliki hasil yang berbeda dengan hasil pengauditan yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, terlebih dari pihak BPKP yang dihadirkan di dalam persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dianggap masih bersifat memihak di dalam menyampaikan keterangan, dengan demikian kualitas dari hasil pengauditan dan kompetensi dari auditor tersebut kualitasnya masih diragukan (Murtapa & Budiarta, 2017).

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan dengan uraian latar belakang masalah dan juga identifikasi masalah tersebut di atas, maka di dalam penelitian yang akan dilaksanakan ini lebih memfokuskan terhadap Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bali. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja auditor maka peneliti hanya meneliti tiga faktor yang diduga memberikan sumangan pengaruh terhadap kinerja auditor pada BPKP Provinsi Bali yaitu, *Good Governance*, Profesionalisme, dan *Indenpendensi*.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka dalam penelitian ini, rumusan masalah yang akan dianalisis ialah sebagaimana berikut ini:

1. Apakah Pemahaman *Good Governanc* memberikan sumbangan pengaruh yang positif dan juga signifikan terhadap kinerja auditor di Perwakilan BPKP Provinsi Bali?
2. Apakah Profesionalisme memberikan sumbangan pengaruh yang positif dan juga signifikan terhadap kinerja auditor di Perwakilan BPKP Provinsi Bali?
3. Apakah Independensi memberikan sumbangan pengaruh yang positif dan juga signifikan terhadap kinerja auditor di Perwakilan BPKP Provinsi Bali?
4. Apakah Pemahaman *Good Governance*, Profesionalisme, dan Independensi secara simultan memberikan sumbangan pengaruh yang positif dan juga signifikan terhadap kinerja auditor di Perwakilan BPKP Provinsi Bali?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini ialah sebagaimana berikut ini:

1. Untuk mengetahui besaran pengaruh dari variabel independen Pemahaman *Good Governanc* terhadap kinerja auditor Perwakilan BPKP Provinsi Bali.
2. Untuk mengetahui besaran pengaruh dari variabel independen Profesionalisme pada kinerja auditor Perwakilan BPKP Provinsi Bali.
3. Untuk mengetahui besaran pengaruh dari variabel bebas Independensi terhadap kinerja auditor Perwakilan BPKP Provinsi Bali.

4. Untuk mengetahui besaran pengaruh dari variabelindependen Pemahaman *Good Governance* Profesionalisme, dan Independensi terhadap kinerja auditor di Perwakilan BPKP Provinsi Bali secara simultan.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Berikut ini ialah manfaat dari penelitian ini, sebagaimana berikut ini

1. Manfaat Teoritis

Dalam pelaksanaan penelitian ini, hasil penelitian diharapkan dapat menyediakan pengetahuan dan juga gambaran tambahan berkenaan dengan faktor-faktor yang dapat memberikan sumbangan pengaruh terhadap kinerja dari auditor dan juga bisa memberikan pengetahuan berkenaan dengan teori pengauditan yang didapatkan selama belajar di universitas dengan kondisi kenyataan yang terjadi di lapangan.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan untuk bisa dipergunakan sebagai bahan pertimbangan, gambaran umum dan juga melibatkannya di dalam melakukan analisa untuk dapat memperbaiki kinerja dari auditor. Tidak hanya itu, hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menyediakan wawasan tambahan dan juga referensi berkenaan dengan hasil dari penelitian yang memiliki keterkaitan dengan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja dari auditor